RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- bahwa pelayanan ketenagakerjaan merupakan bagian dari pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemenuhan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting, sehingga diperlukan penyelenggaraan ketenagakerjaan yang dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja serta berperan dalam pembangunan daerah;
- bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Mengingat:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah pengelolaan urusan ketenagakerjaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
- Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
- Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut PTK Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pengalokasian tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektor tertentu sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.
- Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disebut PTK Mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.
- Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
- Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disebut LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
- Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut LPK Pemerintah adalah lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.
- Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang selanjutnya disebut LPK Swasta adalah lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh badan hukum.
- Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan yang selanjutnya disebut LPK Perusahaan adalah lembaga pelatihan kerja yang memberikan pelatihan sesuai dengan bidang kerjanya.
- Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan LPK yang memberikan fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja kepada aluminya.
- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut PPMI adalah badan usaha berbadan hukum perseorangan yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia.
- Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
- Penyelenggara Pemagangan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pemagangan di dalam negeri.
- Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
- Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disebut Penempatan Tenaga Kerja AKL adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disebut Penempatan Tenaga Kerja AKAD adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja antar daerah provinsi.
- Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disebut Penempatan Tenaga Kerja AKAN adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri.
- Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri.
- Penyuluhan Jabatan adalah kegiatan pemberian informasi mengenai jabatan dan pekerjaan kepada pencari kerja dan masyarakat.
- Bimbingan Jabatan adalah pelayanan kepada pencari kerja untuk mengetahui dan memahami gambaran mengenai potensi diri dan dunia kerja, serta memilih bidang pekerjaan dan karir yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki.
- Perantaraan Kerja adalah proses mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja sampai dengan terjadinya hubungan kerja.
- Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam maupun di luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
- Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- Lowongan Pekerjaan adalah kesempatan yang ada atau belum cukup jumlah orang yang melaksanakannya yang terjadi karena perluasan usaha, perubahan teknis berproduksi atau ada tenaga kerja yang karena sesuatu hal berhenti dari pekerjaannya dan harus diisi dengan tenaga kerja lainnya.
- Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari tanah kelahirannya atau asli dari daerah tempat tinggal dan berdomisili di daerah tersebut serta dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga.
- Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat CPMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pencari Kerja yang akan bekerja di luar negeri yang terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan.
- Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
- Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing yang memegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
- Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
- Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
- Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.
- Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengusaha adalah:
 - orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
 - orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- Perusahaan adalah:
 - setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau

- usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

- Pekerja atau Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
- Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
- Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
- Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.
- Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan dengan Pengusaha atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
- Upah Minimum Kabupaten adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.
- Upah Terendah adalah upah terkecil bagi pekerja pada usaha mikro dan usaha kecil yang ditetapkan oleh Bupati sebagai jaring pengaman.
- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR adalah pendapatan non Upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.
- Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- Lembaga Kerja Sama Tripartit yang selanjutnya disebut LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/buruh.
- Dewan Pengupahan adalah lembaga nonstruktural yang bersifat tripartit.
- Dewan Pengupahan Kabupaten adalah Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Bupati adalah Bupati Bantul.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- melakukan PTK secara terpadu di Daerah; dan
- menyusun kebijakan Ketenagakerjaan di Daerah.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang:

- menyusun PTK;
- melaksanakan Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja;
- melaksanakan Penempatan Tenaga Kerja;
- melaksanakan pengaturan dan perlindungan Hubungan Industrial; dan
- menyelenggarakan urusan ketransmigrasian.

BAB III PERENCANAAN TENAGA KERJA

Pasal 5

- PTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - PTK Makro; dan
 - PTK Mikro.
- PTK Makro dan PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara periodik dan sistematis.
- PTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat pendayagunaan Tenaga Kerja pada skala Daerah.
- PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat pendayagunaan Tenaga Kerja di lingkungan:
 - Pemerintah Daerah; dan
 - internal Perusahaan,
 dengan mempertimbangkan potensi Daerah.
- PTK Makro dan PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Bagian Kesatu Pelatihan Kerja

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- Program Pelatihan Kerja berorientasi pada:
 - kebutuhan pasar kerja;
 - pengembangan sumber daya manusia; dan
 - peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Program Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada:
 - SKKNI;
 - standar internasional; atau
 - standar khusus.

Pasal 7

- Dalam hal terdapat kebutuhan Pelatihan Kerja, maka program Pelatihan Kerja disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pelatihan.
- Hasil identifikasi kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.

Paragraf 2 Penyelenggara Pelatihan Kerja

Pasal 8

Pelatihan Kerja dapat diselenggarakan oleh:

- LPK Pemerintah;
- LPK Swasta; dan/atau
- LPK Perusahaan.

Pasal 9

- LPK Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan LPK Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yang menyelenggarakan Pelatihan Kerja wajib mendaftarkan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach.
- LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan realisasi kegiatan Pelatihan Kerja kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - penghentian sementara pelaksanaan program Pelatihan Kerja;
 - penghentian pelaksanaan program Pelatihan Kerja; atau
 - pencabutan izin LPK.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- LPK Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang akan menyelenggarakan Pelatihan Kerja harus memperoleh perizinan berupa melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach yang berupa sertifikat standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- LPK Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk BKK untuk menempatkan alumni pelatihannya di dalam negeri.
- LPK Swasta yang akan menempatkan aluminya sebagai Tenaga Kerja ke luar negeri wajib bekerja sama dengan P3MI.
- LPK Swasta yang akan memanggalkan alumni pelatihan ke luar negeri wajib memiliki izin Sending Organization sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- LPK Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan realisasi kegiatan Pelatihan Kerja kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- LPK Swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - penghentian sementara pelaksanaan program Pelatihan Kerja;
 - penghentian pelaksanaan program Pelatihan Kerja; atau
 - pencabutan izin LPK.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemagangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian Pemagangan antara peserta Pemagangan dengan Pengusaha tempat magang yang dibuat secara tertulis yang diketahui dan disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.
- Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - program Pemagangan;
 - hak dan kewajiban peserta dan Pengusaha tempat magang;
 - besaran uang saku; dan
 - jangka waktu Pemagangan.
- Dalam hal Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemagangan dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi Pekerja/Buruh pada Perusahaan pemberi pekerjaan.

Pasal 12

Pemagangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- jenis pekerjaan disesuaikan dengan bidang/kejuruan atau jabatan yang dimagangkan di Perusahaan;
- waktu magang di Perusahaan disesuaikan dengan jam kerja yang diberlakukan di Perusahaan dan/atau sesuai perjanjian yang ditetapkan; dan
- para pelaku Pemagangan wajib menaikan seluruh kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian Pemagangan dengan penuh tanggung jawab sehingga berdampak positif bagi Perusahaan maupun peserta magang.

Pasal 13

Jangka waktu Pemagangan dibatasi paling lama 1 (satu) tahun.

Paragraf 2 Penyelenggara Pemagangan

Pasal 14

Penyelenggara Pemagangan harus memiliki:

- program Pemagangan;
- sarana prasarana;
- unit pelatihan;
- pembimbing Pemagangan atau instruktur; dan
- pendanaan.

Pasal 15

- Program Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a paling sedikit memuat:
 - nama program;
 - tujuan program;
 - jenjang kualifikasi tertentu dan/atau kompetensi yang akan dicapai pada jabatan tertentu;
 - uraian pekerjaan atau unit kompetensi yang akan dipelajari;
 - persyaratan peserta Pemagangan;
 - persyaratan pembimbing Pemagangan;
 - jangka waktu Pemagangan; dan
 - kurikulum dan silabus.
- Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui dan disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan peserta Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan persyaratan pembimbing Pemagangan pada ayat (1) huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b harus memenuhi kebutuhan untuk menyelenggarakan pelatihan:

- teori;
- simulasi/praktik;
- keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- buku kegiatan bagi peserta magang.

Pasal 17

Pembimbing Pemagangan atau instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d membimbing peserta Pemagangan sesuai dengan kebutuhan program pemagangan.

Pasal 18

Penyelenggara Pemagangan berhak:

- memanfaatkan hasil kerja peserta Pemagangan; dan
- memberlakukan tata tertib dan perjanjian Pemagangan.

Pasal 19

Penyelenggara Pemagangan wajib:

- membimbing peserta Pemagangan sesuai dengan program Pemagangan;
- memenuhi hak peserta Pemagangan dengan perjanjian Pemagangan;
- menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
- memberikan perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada peserta;
- memberikan uang saku;
- mengikutsertakan peserta Pemagangan dalam program jaminan sosial;
- mengvaluasi peserta Pemagangan;
- memberikan sertifikat Pemagangan bagi peserta yang dinyatakan lulus; dan
- menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Pemagangan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 20

Penyelenggara Pemagangan hanya dapat menerima peserta Pemagangan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah karyawan.

Paragraf 3 Peserta Pemagangan

Pasal 21

Peserta Pemagangan berasal dari:

- Pencari Kerja;
- siswa LPK; dan/atau
- Tenaga Kerja yang akan ditingkatkan kompetensinya.

Pasal 22

- Peserta Pemagangan berhak:
 - memp peroleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti Pemagangan;
 - memp peroleh uang saku dan/atau uang transport;
 - memp peroleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian; dan
 - memp peroleh sertifikat Pemagangan.
- Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Peserta Pemagangan wajib:

- menaati perjanjian Pemagangan;
- menikuti program Pemagangan sampai selesai;
- menaati tata tertib yang berlaku di Perusahaan penyelenggara Pemagangan; dan
- menjaga nama baik Perusahaan penyelenggara Pemagangan.

Paragraf 4 Pembinaan

Pasal 24

Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemagangan di dalam negeri dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap:

- program Pemagangan;
- pembimbing Pemagangan; dan
- sistem dan metode penyelenggaraan Pemagangan.

Bagian Ketiga Konsultasi Produktivitas

Pasal 25

- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan menyelenggarakan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil di Daerah.
- Konsultasi produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - pelatihan peningkatan produktivitas Tenaga Kerja; dan
 - bimbingan konsultasi produktivitas Tenaga Kerja.

Bagian Keempat Pengukuran Produktivitas

Pasal 26

- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan melaksanakan pengukuran produktivitas pada perusahaan kecil di Daerah.
- Pengukuran produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENEMPATAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

Penempatan Tenaga Kerja dilaksanakan berdasarkan asas:

- terbuka;
- bebas;
- obyektif;
- adil; dan
- setara tanpa diskriminasi.

Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menempatkan Tenaga Kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan

harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.

- Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas:

- Penempatan Tenaga Kerja di dalam negeri;
- Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri; dan
- perluasan kesempatan kerja.

Pasal 29

- Penempatan Tenaga Kerja di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri atas:
 - Penempatan Tenaga Kerja AKL; dan
 - Penempatan Tenaga Kerja AKAD.
- Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan; dan
 - lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta.
- Selain pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penempatan Tenaga Kerja dapat dilaksanakan oleh:
 - BKK di satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi; dan
 - LPK Swasta yang mempunyai tanda daftar BKK.
- Lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - lembaga swasta berbadan hukum; dan/atau
 - perusahaan penempatan PMI.

Pasal 30

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilarang memungut biaya baik langsung maupun tidak langsung sebagian atau keseluruhan Tenaga Kerja atau pengguna Tenaga Kerja.

Pasal 31

- Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan Penempatan Tenaga Kerja AKAN.
- Penempatan Tenaga Kerja AKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme:
 - private to private;
 - government to government;
 - government to private;
 - untuk kepentingan Perusahaan sendiri; dan/atau
 - mandiri.

Pasal 32

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dapat memungut biaya Penempatan Tenaga Kerja dari pengguna Tenaga Kerja dan dari Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- Perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilaksanakan sebagai berikut:
 - Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja, baik di dalam maupun di luar Hubungan Kerja;
 - perluasan kesempatan kerja di luar Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mengdayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi tepat guna; dan
 - penciptaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pola:
 - pembentukan dan pembinaan Tenaga Kerja mandiri;
 - terapan teknologi tepat guna;
 - wirausaha baru;
 - perluasan kerja sistem padat karya;
 - alih profesi;
 - pendayagunaan Tenaga Kerja sukarela; dan/atau
 - pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 34

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, pelaksana Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:

- pelayanan IPK;
- pelayanan Penyuluhan Jabatan dan Bimbingan Jabatan; dan
- pelayanan Perantaraan Kerja.

Pasal 35

- Pelayanan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi informasi:
 - Pencari Kerja;
 - Lowongan Pekerjaan; dan
 - Penempatan Tenaga Kerja.
- Pelayanan Penyuluhan Jabatan dan Bimbingan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b diberikan kepada Pencari Kerja melalui pelayanan IPK dan wawancara.
- Pelayanan Perantaraan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi:
 - pelayanan kepada Pencari Kerja;
 - pelayanan kepada Pemberi Kerja;
 - pencarian Lowongan Pekerjaan;
 - pencocokan antara Pencari Kerja dengan Lowongan Pekerjaan;
 - Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar Hubungan Kerja;
 - tidak lanjut Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - pelaporan Penempatan Tenaga Kerja secara berkala.
- Penempatan Tenaga Kerja di luar Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penempatan Tenaga Kerja Lokal

Pasal 36

- Setiap Perusahaan adalah melacak hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan di Daerah untuk menyelenggarakan Tenaga Kerja Lokal.
- Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk lebih terbuka dalam pengembangan pola kerjasama sesuai dengan kondisi Perusahaan dan budaya masyarakat setempat.
- Penyaluran Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kompetensi maupun keahlian yang dibutuhkan oleh Perusahaan.

Pasal 37

- Dalam penanganan pengangguran dan penerimaan Tenaga Kerja, Perusahaan memberikan kesempatan terhadap Tenaga Kerja Lokal dengan lebih mengutamakan warga sekitar sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tanpa mengesampingkan standar kompetensi Tenaga Kerja yang dibutuhkan oleh Perusahaan.
- Pelaksanaan persiapan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan secara terbuka dan transparan.
- Dalam hal Lowongan Pekerjaan dengan keahlian khusus tidak dapat diisi dengan Tenaga Kerja Lokal dan warga sekitar, maka dapat diisi oleh Tenaga Kerja dari luar Daerah.
- Keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan sertifikat keahlian dan/atau ijazah.

Bagian Keempat Pelindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri

Pasal 38

- Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap CPMI dan PMI.
- Pelindungan terhadap CPMI atau PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - pelindungan sebelum bekerja; dan
 - pelindungan setelah bekerja.
- Pelindungan terhadap CPMI sebelum bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan memberikan:
 - penempatan administratif berupa:
 - CPMI harus memiliki kartu tanda penduduk Daerah paling singkat 2 (dua) tahun untuk dapat diproses keberangkatannya;
 - pengecekan kelengkapan dan keabsahan dokumen CPMI;
 - Pemerintah Kalurahan bertanggungjawab melakukan pengecekan surat keterangan izin suami/istri/orang tua/wali; dan
 - penetapan kondisi dan syarat kerja.
 - pelindungan teknis paling sedikit berupa:
 - pendidikan dan pelatihan kompetensi CPMI sesuai dengan kebutuhan kompetensi di negara tujuan;
 - socialisasi dan diseminasi informasi;
 - jaminan sosial;
 - fasilitasi pemenuhan hak CPMI;
 - penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
 - pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap PMI; dan
 - pembinaan dan pengawasan.
- Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- Pelindungan terhadap PMI setelah bekerja atau purna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan memberikan pemberdayaan PMI purna dan keluarganya.

Pasal 39

- Pemerintah Kalurahan melaksanakan pelindungan CPMI dan PMI.
- Pelindungan CPMI dan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan;
 - melakukan verifikasi data dan pencatatan CPMI;
 - memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi pendudukan CPMI;
 - melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI; dan